

BAB VI PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Temuan Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Nagekeo Temuan Audit Setiap Tahunnya meningkat yaitu pada tahun 2014 ada 13 Temuan, pada Tahun 2015 terdapat 14 Temuan dan Pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi 17 Temuan.

2. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan hasil analisis data menyangkut hasil pemeriksaan BPK RI, masih terdapat temuan-temuan yang belum diselesaikan untuk ditindak lanjuti. Dari Tahun Anggaran 2014-2016 terdapat 44 temuan dengan 113 saran. Dari saran yang dikelurkan oleh BPK RI yang sudah ditindak lanjuti 76 saran, sedangkan yang masih dalam proses 37 saran(67,26%). Total nilai kerugian yang diperoleh Negara/Daerah dari Tahun Anggaran 2014-2016 sebesar Rp 6,165,891,060.80, yang sudah dikembalikan ke kas Negara/Daerah sebesar Rp 3,202,424,349.98 atau 51.94% dan masih terdapat nilai temuan yang belum dikembalikan ke kas Negara/Daerah sebesar Rp 2,963,466,710.82 atau 48,06%.

3. Upaya Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tindak Lanjut.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2014-2016 pada kenyataannya masih mengalami berbagai hambatan dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hambatan tersebut berakibat pada permasalahan tindak lanjut yang masih dalam proses. Tindak Lanjut yang

masih dalam proses dari tahun 2014-2016 adalah 37 saran dari 113 Saran yang diberikan oleh BPK.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilaksanakan, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Untuk Temuan Audit

- 1) Melakukan upaya-upaya agar dapat memperkecil Temuan setiap tahunnya.
- 2) Harus ada aturan yang jelas untuk mengatur pihak-pihak terkait agar mereka lebih peka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka agar dapat meperkecil temuan tiaph tahunnya.

2. Untuk Tindak Lanjut

- 1) Untuk Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang belum atau sedang ditindaklanjuti, perlu diprioritaskan pada kasus-kasus yang besar, sehingga jumlah kerugian Negara yang berhasil diselamatkan meningkat.
- 2) Harus ada aturan yang jelas untuk mengatur para auditor, agar mereka lebih peka terhadap tugas dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan audit.

3. Untuk upaya Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TLHP

- 1) Mempercepat penyelesaian tindak lanjut dengan maksimal.

- 2) Mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan TLHP dengan meningkatkan koordinasi yang baik dengan pihak terkait dan penanggung jawab temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra.2014. *Audit Sektor Publik (edisi Ketiga)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- BPK – RI, 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I & II Tahun 2015, Jakarta.www.bpk.go.id
- BPK – RI, 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016, Jakarta.www.bpk.go.id
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo.*Gambaran Kabupaten Nagekeo.2018*
- Erlina & Rambe, Omar Sakti. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrual*. Jakarta:Salemba Empat
- Halim, A. 2001. *Akuntansi Sektor Publiki: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.itjen.kkp.go.id/publikasi/artikel/254-urgensi-tindak-lanjut-temuan-bpk.html.2018/08/13.06:47>
- Inspektorat Kabupaten Nagekeo. Rekapitulasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2008-2018.
- Kementrian Jenderal Keuangan RI. 2014.*Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD*.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2014, 2015 Dan 2016, BPK RI Wilayah Provinsi NTT.
- Mulyadi. (2002). *Auditing Buku 1*. SalembaEmpat. Jakarta.
- Nih Luh Ketut Shanti Antik Safitri, Darsono, Pengaruh System Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah. Skripsi. 2015. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. <http://ejournal-undip.ac.id/index.php/accounting>
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. 2007. Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* 2008. Jakarta.
- Safitri, N. L. K Shanti Antik, 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro. [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/1117](http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/1117)
- Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 Kabupaten Nagekeo. Kupang. BPK. www.bpk.go.id. 2018/02/16.11:32
- Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 Kabupaten Nagekeo. Kupang. BPK. www.bpk.go.id. 2018/02/16.11:32
- Sisilia Amelia Essing, Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Skripsi. Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. 2018/08/09.20:56
- Soekrisno, A. 2004. *Auditing*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Sri Yunawati, Analisis Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Skripsi. 2016: Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian. [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/1117](http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/1117). 2018/03/17.14:00
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara*. 2004. Jakarta. Sekretaris Negara Republik Indonesia.